



Gianyar Siap Cairkan Dana Bencana Rp 2 M

BPBD Klungkung Sosialisasikan Kewaspadaan Bencana

GIANYAR, NusaBali

Pemkab Gianyar melalui BPBD Gianyar masih melakukan pendataan kerusakan akibat gempa. Pemerintah menyiapkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 2 miliar. Dana itu bisa dibagikan ke korban bencana dengan catatan korban bencana mengajukan proposal terlebih dahulu.

Kepala BPBD Gianyar Anak Agung Oka Digjaya, menyatakan sedang mendata kerusakan bangunan akibat gempa. "Ini hampir seluruh kecamatan kena, saking banyaknya petugas masih menginventarisir jumlah kerugiannya," ujar Oka Digjaya, Selasa (7/8). Pihaknya berharap penafsiran jumlah kerugian bisa direkap secepatnya. "Dari tafsiran kerugian itu kami bisa tahu, ketika ada masyarakat meminta bantuan bisa diberikan," ujarnya. Mengenai kerugian yang menimpa masyarakat Gianyar, pemilik bangunan bisa mengajukan proposal. Dikatakan Digjaya, dari proposal yang diajukan itu, tidak sepenuhnya akan ditanggung. "Karena sifatnya hanya bantuan simultan," terangnya. Kata Digjaya, bantuan pemerintah sebatas penyemangat saja. "Yang jelas kami sudah menyiapkan Rp 2 miliar untuk tahun ini," terangnya.

Pihaknya mengaku tidak berbelit-be-

lit dalam penanganan bantuan bencana. "Kalau ada yang mengajukan, segera. Kami siapkan," tukasnya.

Pemulihan bencana di Gianyar juga dibantu oleh kepolisian Polres Gianyar. Seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Aiptu Ida Bagus Nyoman Darsa. Kepolisian ikut membantu memindahkan material bangunan tembok milik I Gusti Ngurah Adi yang rusak akibat gempa. Adapun kerugian akibat

robohnya tembok panyenger di paling-gih milik Ngurah Adi sebesar Rp 30 juta.

Sementara itu, gempa bumi berkali-kali belakangan ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung meningkatkan sosialisasi kewaspadaan bencana kepada masyarakat lewat aparat desa dan prajuru adat. Sosialisasi terkiat langkah-langkah yang mesti dilakukan ketika terjadi gempa, hingga membuat peta jalur evakuasi.

Bercermin dari musibah gempa

berkekuatan 7 SR (skala richter), yang berpusat di Lombok, Minggu (5/8) petang, hingga menyebabkan korban jiwa dan luka, termasuk di Klungkung hingga 11 orang luka-luka. BPBD Klungkung pun akan melakukan sosialisasi langsung untuk terjun ke masyarakat.

Untuk memberikan arahan langkah tepat ketika terjadi bencana, kata Widiada, di antaranya jangan panik berlebihan dan lari karena bisa menyebabkan terpeleot dan jatuh. Kemudian mencari tempat yang lapang, jauh dari bangunan. "Kami akan membuat peta evakuasi untuk di perumahan, di mana titik kumpul saat terjadi gempa," ujarnya, kepada NusaBali, Selasa (7/8). Diharapkan dengan peta evakuasi ini bisa menghindari terjadinya korban saat terjadi gempa.

Guna mengantisipasi dampak gempa terutama jika terjadi pada malam hari atau dinihari, di mana sedang tidur pulas, warga bisa melakukan antisipasi manual dengan menaruh benda-benda yang tidak mudah pecah di atas almari. Sehingga begitu terjadi guncangan benda itu jatuh ke lantai dan menimbulkan suara keras, yang bisa spontan bisa membangunkan dari tidur. "Saya taruh 1 panci di atas almari," ujar Eka Saputra, seorang warga Klungkung. **nvi,wan**



Sejumlah kerusakan akibat gempa di Gianyar.

Edisi : Rabu, 8 Agustus 2018

Hal : 6



Dilimpahkan, Tersangka Kedua Langsung Ditahan

★ Korupsi Lahan Tahura di Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan



● NUSABALI/REZA

TERSANGKA IWS yang terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan Tahura di Perarudan, Jimbaran menjalani pemeriksaan di Kejati Bali, Senin (6/8) pagi.

DENPASAR, NusaBali

Setelah menyidangkan pekak (kakek) 83 tahun bernama I Wayan Rubah, penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali kini melimpahkan berkas tersangka kedua dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan Tahura (Taman Hutan Rakyat) di Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung seluas 847 m2.

Tersangka kedua yang dilimpahkan ke Kejati Bali pada, Senin (6/8) pagi tersebut berinisial IWS, 58. IWS diduga berperan sebagai perantara yang bertugas mencari tanda tangan kepada pejabat terkait dan pihak lainnya dalam berkas permohonan pensertifikatan lahan Tahura tersebut.

Kabid Humas Polda Bali,

Kombes Hengky Widjaja mengatakan, penetapan IWS sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya, yaitu tersangka IWR (tersangka dalam perkara pokok pada berkas perkara terpisah). Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 29 orang saksi dari instansi terkait dan 6 orang saksi ahli.

"Usai dilimpahkan, ke Kejati Bali tersangka langsung menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara, Badung," lanjut perwira melati tiga ini. Dijelaskannya, dalam kasus penyerobotan aset Tahura berupa lahan seluas 847 m2 yang terletak di Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta

Selatan, Badung ini, tersangka IWS bertugas mencari tanda tangan kepada pejabat terkait dan pihak lainnya dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah tersebut kepada almarhum IGPW sebagai penerima kuasa (tersangka dalam berkas perkara terpisah).

IWS juga membuat pondasi beton di sekeliling objek tanah yang diakui milik ayahnya, IWR. Kemudian, IWS bersama IWR menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas ukur BPN Kabupaten Badung. Dari hasil pengukuran tanah ini, maka terbitlah sertifikat hak milik No. 20534 tanggal 21 Januari 2015 atas nama IWR. Di mana, objek lokasi tanah seluruhnya merupakan kawasan hutan Tahura Ngurah Rai pada pal batas B.336, B.337 dan B338.

Tidak hanya itu, ia juga ikut bertanggung jawab atas kebenaran materiil warkah atau berkas yang diajukan dalam permohonan pengakuan hak atas objek tanah. Selanjutnya ia menerima transfer uang sebesar Rp. 490 juta dari IGPW sebagai uang hasil penjualan tanah dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

"Akibat adanya kejadian tersebut aset negara menjadi berkurang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 4,86 miliar sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Bali," kata Kabid Humas Polda Bali didampingi Wadir Reskrimsus Polda Bali, AKBP Ruddi Setiawan. rez

Edisi : Selasa, 7 Agustus 2018

Hal : 5



Pemkot Gelontor Rp 3,5 Miliar Tata Dam Oongan

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Kota Denpasar gelontor Rp 3,5 miliar untuk kembali melakukan penataan sungai di Kota Denpasar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penataan Dam Oongan di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Penataan tersebut ditargetkan akan dimulai awal 2019 mendatang.

Pt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta saat dikonfirmasi, Jumat (3/8) mengungkapkan, penataan tersebut dilakukan sebagai lanjutan program penataan delapan sungai di Denpasar. Sungai Dam Oongan ditata untuk mengurangi pembuangan sampah oleh masyarakat ke sungai dan memperhatikan sektor lingkungan.

Selain itu, penataan tersebut juga dirancang untuk penambahan sektor pariwisata Kota di Denpasar. "Kami targetnya menata semua sungai di Denpasar. Kali ini sungai yang mendapat giliran penataan setelah Tukad Badung yakni Dam Oongan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan khususnya tidak membuang sampah ke sungai," ungkapnya.

Penataan tersebut prosesnya akan disamakan dengan sungai lainnya yakni dengan fasilitas jogging track, taman bermain, hingga tempat rekreasi. Namun kata Jimmy, kemungkinan yang berubah dari sungai lainnya yakni bentuknya karena menyesuaikan dengan posisi sungai. "Ya akan disamakan dengan yang lain. Ada fasilitas yang memadai untuk tempat rekreasi," imbuhnya.

Kata dia, penataan Dam Oongan akan menyambung dengan Tukad Bindu yang sudah ditata secara bertahap. Dimana sungai di Denpasar penataannya akan saling bertemu untuk melengkapi keindahan sungai, hingga saat ini kajian untuk penataan sudah dilakukan. Kata dia, saat ini Detail Engenering Design (DED) juga sudah diterbitkan namun masih ada beberapa perubahan yang kembali harus dibenahi dan didiskusikan.

"DED sudah ada, dan kita siapkan melalui tender akhir tahun ini dengan anggaran Rp 3,5 miliar agar bisa dikerjakan di awal tahun 2019 mendatang. Kami harap semua sungai di Denpasar sesuai komitmen walikota Denpasar bisa dirampungkan seluruhnya termasuk sungai mati yang juga sudah ditata," jelas Pria yang menjabat Asisten II Setda Kota Denpasar ini. **mi**

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

Hal : 3



Kejari Klungkung Terima Hasil Pemeriksaan BPK

Kerugian Proyek Biogas Rp 729 Juta

Pihak kejaksaan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait, sebelum nantinya dilakukan penetapan tersangka.

SEMARAPURA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek Biogas di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung tahun 2014. Ke-

jari sudah menerima laporan hasil kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Rp 729.912.654, dari nilai proyek biogas Rp 890 juta.

Berdasarkan kerugian tersebut, Kejari akan menggelar ekspose perkara dengan tim. Apabila ketika ekspose perkara itu masih kurang, Kejari akan memanggil pihak terkait sebelum penetapan tersangka.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi ini merupakan proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kementerian ESDM dan 10 persen dari APBD tahun 2014 sebesar Rp 890 juta. Proyek

tersebut tersebar di tiga desa di Nusa Penida, yaitu Desa Sakti, Desa Klumpu dan Desa Kutampi Kaler. Dari 40 titik biogas yang direncanakan hanya 38 titik saja terlaksana sedangkan 2 titik tidak ada. Padahal per satu unitnya, proyek tersebut bernilai Rp 22 juta. Ketika itu proyek biogas ini di bawah leading sektor oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa Klungkung. Setidaknya dalam kasus ini sebanyak 70 saksi sudah diperiksa.

Kasi Pidus Kejari Klungkung I Kadek Wira Atmaja mengatakan,

pihaknya sudah menerima laporan hasil kerugian negara dari BPK terkait kasus proyek biogas Rp 729.912.654. "Kami terima laporan itu pada 20 Juli 2018," ujarnya, Jumat (3/8).

Jika saat ekspose perkara nanti dipandang ada hal yang masih kurang, pihak kejaksaan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait, sebelum nantinya dilakukan penetapan tersangka. Disebutkan dalam waktu dekat akan dilakukan ekspose, sebelum nanti menetapkan tersangka.

Proyek tersebut bersumber dari DAK dan Kementerian ESDM serta 10 persen dari APBD 2014

totalnya Rp 890 juta. Kemudian BPK dalam laporannya mengungkap bahwa proyek biogas yang jumlahnya sebanyak 40 unit ternyata tidak termanfaatkan dan hanya 38 titik saja yang terealisasi. Selain itu ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sehingga proyek itu sama sekali tidak termanfaatkan.

Selain penerima bantuan biogas, pihak Kejaksaan juga memeriksa pejabat eselon II (setingkat Kadis), eselon III (Setingkat Kabid), dan pihak terkait lainnya. **wan**

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

Hal : 6